

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat terakhir bagi pelaku tindak pidana untuk membayar kejahatan mereka. Warga Binaan ketika menghuni di Lembaga Pemasyarakatan, baik tahanan maupun narapidana dibina oleh pembimbing pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemasyaratakan, yaitu agar mereka dapat memahami kesalahan mereka, dan dapat kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pembinaan yang dilakukan membutuhkan komunikasi sebagai unsur paling penting dalam proses tersebut, terutama komunikasi yang terjadi di antara Petugas Pembina dan Warga Binaan.

Warga Binaan memasuki LAPAS setelah ia ditetapkan menjadi tersangka, menjadi tahanan, dan ketika putusan hukuman telah ditetapkan, ia akan menjadi narapidana. Pertama mereka memasuki LAPAS, mereka harus melakukan pendaftaran identitas diri, yang kemudian menunjukkan bahwa mereka memang Warga Binaan. Mereka kemudian ditempatkan pada blok sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Indonesia memiliki LAPAS khusus perempuan, di mana LAPAS itu hanya menampung pelaku kejahatan berjenis kelamin perempuan. Pelaku kejahatan resmi terlepas dari keluarga dan sosial mereka saat mereka ditetapkan menjadi Warga Binaan. Mereka kemudian menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan baru

mereka, untuk kemudian muncul kenyamanan berada di tempat baru dan membuat suatu ikatan kekeluargaan baru di dalam LAPAS. Terdapat hubungan yang terjadi antara Warga Binaan dan Petugas Pembina di dalam LAPAS. Petugas Pembina diibaratkan sebagai sosok keluarga pengganti bagi Warga Binaan dan dengan begitu mereka pun bebas berkomunikasi dan menceritakan keseharian dan keluh kesah mereka. Hubungan dengan keluarga pengganti inilah yang kemudian membawa komunikasi lebih ke tingkat personal. Selain itu, Petugas Pembina juga melakukan pendekatan interpersonal kepada Warga Binaan untuk memahami karakteristik mereka dan melakukan penyesuaian. Kondisi di mana dalam latar tersebut, kedua pihak saling berusaha membuat suatu ikatan untuk memahami dan ingin dipahami pihak lain.

Petugas Pembina maupun Warga Binaan memiliki hubungan yang terjalin. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, Warga Binaan bahkan tidak segan mengobrol dengan Petugas Pembina menyangkut hal pribadi, yang pada saat itu adalah parfum dan *skin lotion*. Mereka dengan santai mengobrol dengan Petugas Pembina, bahkan pada saat bersamaan, ada penjenguk yang menjenguk mereka, dan mereka turut mengenalkan penjenguk itu dengan para petugas. Mereka juga tidak malu dan justru bercanda ketika mereka diperiksa kembali setelah bertemu dengan penjenguk mereka. Termasuk dalam bengkel kerja, beberapa petugas merupakan atasan mereka dan hubungan itu berubah menjadi hubungan formal secara rekan kerja selama jam kerja, di luar jam kerja, dinamika pun kembali seperti awal. Beberapa Warga Binaan mengungkapkan, bahwa keadaan di mana baik petugas maupun Warga Binaan sama – sama wanita membuat mereka memiliki banyak hal yang dapat di komunikasikan. Pada

tahap pribadi pun, mereka sering mengkomunikasikan masalah pribadi maupun gossip terbaru, terutama gossip yang beredar dalam LAPAS itu sendiri. Mereka berkomunikasi dan memberikan feedback agar komunikasi itu uturus terjalin. Namun, tidak semua respon yang diharapkan Warga Binaan dapat mereka dapatkan. Mereka mengharapkan respon yang lebih aktif kepada mereka, tidak hanya respon biasa, namun respon yang lebih interaktif. Sedangkan menurut Petugas Pembina, respon yang mereka berikan telah tepat dengan batas – batas tertentu agar Warga Binaan tetap menekankan rasa segan dan hormat kepada Petugas Pembina. Petugas Pembina juga menekankan bahwa dalam hubungan itu, pada ranah privat, mereka cenderung akan menjadi pihak pendengar, dan akan menjadi *attentive listener*, dengan memberikan respon – respon sederhana terhadap pesan yang dikomunikasikan kepada mereka.

Di Indonesia, LAPAS dilaksanakan di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM pada divisi pemasyarakatan dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya akan disebut LAPAS. Ada 24 Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Tengah. 19 Lembaga Pemasyarakatan umum, 1 Lembaga Pemasyarakatan wanita, 1 Lembaga Pemasyarakatan anak, 1 Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba, dan 2 Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah dengan lapas terbanyak di Indonesia. Semarang memiliki 2 LAPAS, 1 LAPAS umum Klas IA dan LAPAS Perempuan Klas IIA. Seperti namanya, LAPAS Perempuan hanya menerima tahanan dan narapidana perempuan. Dan tentu saja petugas yang terlibat sebagian besar perempuan dan beberapa laki – laki. (Sumber : <http://www.ditjenpas.go.id/>)

LAPAS perempuan dihuni oleh 379 Warga Binaan yang terdiri dari 87% (333) narapidana dan 13% (46) tahanan. Narapidana merupakan Warga Binaan yang putusannya telah dijatuhkan dalam pradilan, sedangkan tahanan adalah Warga Binaan yang masih menjalani proses pengadilan.

Tabel 1 1Data Warga Binaan LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang

Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
Pencurian	10	4
Penggelapan	13	6
Penipuan	16	
Pembunuhan	14	1
Uang Palsu	4	1
Narkotika	224	21
Penadahan	1	1
Korupsi	28	6
UU Perlindungan Anak	6	1
Perbankan	2	
KDRT	4	
Perdagangan Manusia	3	
Pencucian Uang	5	1
Perampokan	1	

Terorisme	1	
Pornografi	1	
Penganiayaan		1
Perpajakan		3
Jumlah	333	46

Sumber data : Buku Inventaris Data Masyarakatan milik LAPAS

Perempuan Klas IIA Semarang diambil pada 20

Desember 2017.

Terdapat peraturan dan jadwal tertentu dalam LAPAS yang harus diikuti dan ditaati oleh seluruh Warga Binaan. Seluruh nya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013. Ketika pertama kali mereka datang ke LAPAS, seluruh Warga Binaan haruslah terdaftar dan memiliki kartu identitas dalam LAPAS, dan telah melakukan pencatatan sidik jari dan identitas lainnya. Selama berada dalam LAPAS, Warga Binaan wajib mematuhi segala tata tertib dalam LAPAS dan menerima konsekuensi apabila tidak menaati. (Sumber : Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013)

Kegiatan para Warga Binaan pun terjadwal, terdapat jadwal yang di letakkan pada beberapa sudut LAPAS sebagai pengingat. Seperti waktu untuk bangun tidur, dan aktifitas di sana. Dalam blok – blok sel, pintu akan dibuka hanya pada saat – saat tertentu, pintu blok hanya akan dibuka pada pukul 05.30 – 06.30 pagi untuk aktifitas ibadah pagi, pukul 08.00 – 11.30 untuk memulai aktifitas hari , baik itu di bengkel kerja maupun untuk menunggu dijenguk, dan pukul 13.00 untuk beraktifitas umum, pintu

blok akan ditutup pukul 16.00 setiap harinya dan tidak akan dibuka sebelum pagi datang. Pembagian tempat hunian Warga Binaan pun telah ditentukan. Seluruh Warga Binaan ditempatkan dalam sepuluh blok tempat tinggal. Blok ini dibagi sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Setelah dibagi sesuai dengan tindak pidana kejahatan umum, dan tindak pidana kejahatan khusus. Seperti narapidana dengan kasus khusus narkoba, dan korupsi, mereka tidak tinggal bersama dengan pelaku kejahatan umum seperti perampok, atau penipuan.

Menurut survey awal pada LAPAS, penggunaan media massa selama menjalani masa tahanan di dalam LAPAS sangat terbatas. Tersedia 1 televisi untuk blok dan dinyalakan setiap pukul 17.00 hingga 22.00 setiap harinya dengan kontrol ada di ruangan petugas. Tidak boleh ada koran, maupun majalah, atau apapun yang bersifat media massa untuk dibawa ke dalam sel. Namun diperbolehkan membawa buku bacaan, walaupun tidak disarankan, karena ada perpustakaan keliling yang akan datang setiap satu minggu sekali ke LAPAS. Apabila keluarga Warga Binaan membawakan radio, melalui serangkaian pemeriksaan, radio itu boleh digunakan.

Pemasyarakatan memiliki undang – undang mereka sendiri, yaitu UU NO 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan telah ditulis hak – hak yang di dapat oleh narapidana, yaitu, melakukan ibadah, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, membaca dan menikmati siaran pada saluran media massa yang tidak dilarang. Mendapatkan premi atas pekerjaan mereka (termasuk pekerjaan di

bengkel kerja), menerima kunjungan keluarga dan penasihat hukum, mendapatkan remisi, mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya. Serta, seluruh Warga Binaan, dalam proses pembinaannya, seluruh kehidupannya ditanggung oleh Negara.

Warga Binaan dapat memilih berbagai kegiatan selama menghuni di dalam LAPAS, mereka dapat memilih untuk belajar berbagai keterampilan dan bekerja pada bengkel kerja yang berada di area LAPAS, menemui keluarga yang menjenguk sesuai dengan jadwalnya. Namun selain itu, pihak LAPAS juga memiliki serangkaian kegiatan bersama, baik itu didasari oleh pihak LAPAS sendiri maupun kegiatan yang melibatkan sponsor dan pihak ketiga, seperti dari perusahaan, akademisi, dan lain sebagainya. Beberapa narapidana terpilih, dapat mengajukan diri untuk menjadi Kamtib, di mana ia akan bekerja untuk membantu para Petugas Pembina dalam hal – hal tertentu, seperti mengetik dan melakukan pekerjaan ringan lainnya. Kamtib ini memiliki jam tahanan sedikit lebih fleksibel, karena ia dapat berada di luar blok pada jam – jam tertentu. Mereka di tempatkan dalam beberapa posisi petugas sesuai pekerjaan mereka.

Petugas dalam LAPAS perempuan ini, untuk membina 379 Warga Binaan, terdapat 55 Petugas Pembina, sesuai dengan keterangan dari pihak Bimnas LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang. Terdiri dari 16 Laki – laki dan 39 perempuan. 14 orang merupakan pejabat struktural, 15 orang petugas bekerja pada sektor administrasi, dan 26 adalah Petugas Pembina yang berada langsung di lapangan. Mereka merupakan pegawai negeri sipil terpilih dengan kemampuan dan pelatihan yang telah diberikan. Dalam satu

hari terdapat 3 *shift* dalam penjaga para Warga Binaan, pagi, pukul 07.00 - 12.00, siang pukul 12.00 – 19.00, dan malam pukul 19.00 - 07.00. Dalam satu *shift* terdapat 3 petugas berada dalam kawasan blok dan 3 petugas laki – laki di gardu depan. Kecuali pada shift malam, 2 petugas administrasi akan diperbantukan untuk menjaga di dalam. Dan pada jam kerja, petugas yang berjaga ditambah namun, petugas – petugas tersebut tidak tinggal di dalam LAPAS. (Sumber : BIMNAS LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang)

Komunikasi dalam LAPAS sangat terbatas. Terutama komunikasi yang dilakukan oleh Warga Binaan. Komunikasi dari Warga Binaan yang tidak langsung, atau melalui medium hanya dilakukan melalui telepon kabel yang ada di dalam kawasan blok, karena tidak boleh ada barang elektronik yang masuk ke dalam kawasan blok sel tahanan. Sedangkan komunikasi langsung yang dilalui oleh Warga Binaan hanya kepada 3 pihak, yaitu ke sesama Warga Binaan, biasanya yang berada pada sel dan blok yang sama atau yang berada pada bengkel kerja yang sama, kepada penjenguk mereka, mereka dapat berkomunikasi dengan bebas di tempat yang telah ditentukan ketika keluarga atau kerabat mereka datang menjenguk, itupun hanya pada hari tertentu dan dibatasi oleh waktu. Komunikasi terakhir yang mungkin terjadi adalah komunikasi kepada Petugas Pembina. Mereka bertugas dan berada di sekitar Warga Binaan 24 jam, membina mereka selama berada di bengkel kerja, terlibat dalam segala aktifitas yang mereka lakukan, bahkan jika menjadi kamtib, maka petugas bertugas sebagai atasan langsung mereka.

Komunikasi yang terjadi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan memiliki kesempatan yang sangat banyak. Komunikasi yang terjadi di antara mereka pun, tidak terpaku hanya pada satu topik, tapi berbagai macam, tetapi, ada batas – batas yang diberikan oleh satu pihak tertentu dalam komunikasi tersebut. Para Petugas Pembina harus memberikan garis yang jelas untuk menekankan bahwa mereka, dalam LAPAS merupakan pihak superior dan para Warga Binaan adalah pihak inferior. Rasa segan ditekankan kepada Warga Binaan semata agar Warga Binaan merasa patuh dan hormat terhadap para petugas. Itu semua agar Warga Binaan memahami ada batas – batas yang harus disetujui dan tidak dilampaui dalam berkomunikasi. Baik Warga Binaan maupun petugas merupakan perempuan, hal itu diungkapkan membuat variasi topik semakin banyak. Ketika menghuni LAPAS, ketika Warga Binaan terpisah dari keluarganya, petugas adalah salah satu pengganti untuk itu. Salah satu pihak yang dianggap mudah oleh Warga Binaan untuk bercerita adalah petugas, terutama apabila ia merupakan petugas yang sering berada di sekitar blok sel mereka. Namun kembali lagi, petugas mungkin dapat menjadi pihak pendengar, namun mereka tetap memberikan batas – batas tertentu dalam penyampaian respon mereka.

Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sesuai dengan pasal 1 UU no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh LAPAS berdasarkan pada 3 pilar dalam dilaksanakan pembinaan, yaitu sistem, kelembagaan dan cara. Cara dan sistem pembinaan pun dilaksanakan berdasarkan 7 asas, dan telah diatur dalam undang – undang tersebut, tepatnya pada pasal 5, yaitu, pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk bertemu keluarga.

Komunikasi menjadi unsur penting dalam proses pembinaan. Terutama komunikasi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan, karena dua belah pihak itulah yang memiliki kontrol terhadap proses pembinaan. Schramm menyebutkan dalam model komunikasi interaksional, di mana model komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi terjadi dalam dua arah dan secara berkelanjutan. Selama proses komunikasi, partisipan – partisipan dapat menjadi komunikator maupun komunikan, dan timbal balik adalah hal yang pasti terjadi dalam proses komunikasi model ini. Timbal balik bisa disengaja maupun tidak, verbal maupun non verbal (West, 2010 : 12 – 13).

Komunikasi bisa terjadi pada berbagai level, yaitu intrapersonal, dalam diri sendiri. Level interpersonal atau antar pribadi. Pada level kelompok, baik itu kelompok setara maupun tidak setara, dan komunikasi kelompok pada kelompok budaya berbeda. Komunikasi di LAPAS, selama proses pembinaan, komunikasi terjadi antara Warga Binaan dan Petugas Pembina. Pesan – pesan dikomunikasikan di antara mereka sebagai bentuk pembinaan, dan efek yang diharapkan muncul adalah pemahaman pada Warga

Binaan agar memahami kesalahan mereka. Komunikasi yang terjadi di antara mereka haruslah berjalan secara dua arah, di mana tidak hanya pembina saja yang melakukan komunikasi, namun Warga Binaan berhak untuk mengkomunikasikan dan mendapatkan timbal balik atas pesan – pesan mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melakukan pembinaan Warga Binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan guna untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pemasyarakatan di Indonesia melibatkan pembina, Warga Binaan, dan masyarakat. Warga Binaan dalam LAPAS dibina agar ketika kembali ke masyarakat dapat diterima dan dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab. Selama proses pembinaan, komunikasi memiliki peran penting. Namun komunikasi yang terjadi di dalam LAPAS sangat terbatas. Warga Binaan hanya dapat melakukan komunikasi pada 3 pihak, sesama Warga Binaan, penjenguk mereka, dan para Petugas Pembina. Komunikasi yang terbatas, belum lagi adanya jarak superior dan inferior antara Petugas Pembina dan Warga Binaan tentunya berpengaruh dalam komunikasi yang terjadi selama proses pembinaan tersebut. Di mana pembina memberikan jarak dan batas tertentu terhadap komunikasi yang terjadi di antara mereka.

Komunikasi merupakan hal penting dalam proses pembinaan, Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antara partisipan - partisipan dan menimbulkan timbal balik. Seharusnya, dalam komunikasi, kedua belah pihak berada dalam satu

posisi yang sama. Posisi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan merupakan partisipan yang komunikasi berasal dari dua arah yang berbeda. Namun, komunikasi yang terjadi pada proses pembinaan cenderung berada pada satu arah, dan terdapat jarak dan batas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Komunikasi antara Petugas Pembinaan dan Warga Binaan dalam proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan perempuan klas IIA Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi yang terjadi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan dalam proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan perempuan klas IIA Semarang.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah kajian teori pendekatan interaksi *Interactional View*, teori tersebut digunakan untuk melihat interaksi komunikasi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk menambah bahan ilmiah mengenai komunikasi pada Lembaga Pemasyarakatan.

1.4.2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat agar Petugas Pembina memahami kondisi Warga Binaan dan melakukan komunikasi tepat guna untuk melaksanakan

proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan.

1.4.3. Sosial

Penelitian ini diharapkan bermanfaat agar masyarakat memahami kondisi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan paradigma konstruktivisme, secara ontologi, menyatakan bahwa realitas ada dalam berbagai macam bentuk konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, dan tergantung orang yang melakukannya. menurut paradigma ini, realitas tidak dapat digeneralisasikan. Realita merupakan hasil perpaduan interaksi antara pengamatan dan objek, serta bersifat subjektif. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis melalui pengamatan langsung agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana peran. (Salim, 2001 : 41-42).

Paradigma Konstruktivisme memiliki indikator sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian, antara lain : penggunaan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data dan analisis, mencari relevansi indikator untuk memahami data, teori yang digunakan cenderung *grounded theory*, kegiatan harus bersifat natural, pola yang diteliti dan berisi kategori - kategori jawaban menjadi unit analisis, dan penelitian bersifat partisipatif. Paradigma ini juga memiliki implikasi, yaitu, fenomena interpretatif akan menjadi alternatif dalam menjelaskan realitas yang

ada, paradigma ini akan menambah khasanah paham dan aliran yang akan memberikan alternatif untuk melihat kebenaran dari sudut pandang berbeda, Konstruktivisme akan memberikan pandangan berbeda dalam melihat kebenaran, sehingga akan berpengaruh pada nilai - nilai yang dianut, etika, akumulasi, pengetahuan, model pengetahuan, dan diskusi ilmiah. (Salim, 2001 : 63)

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, di mana penelitian ini tidak melihat suatu realitas dan kebenaran hanya satu dan digeneralisasikan. Paradigma ini melihat bahwa realitas berbeda sesuai dengan konstruksi sosial, mental, dan sebagainya. Penelitian ini melihat bahwa realitas yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan realitas seperti yang digeneralisasikan. Penelitian ini akan melihat realitas yang terjadi dalam LAPAS apa adanya sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam LAPAS. Kehidupan dalam LAPAS yang berbeda dari kehidupan di luar tentu saja membuat komunikasi dalam LAPAS berbeda dan menciptakan kondisi yang berbeda pula. Penelitian ini akan melihat kondisi dan komunikasi yang terjadi di dalam LAPAS sebagai hal baru, sesuai dengan paradigma konstruktivisme.

1.5.2. State of the Art

Susetyo, Heru (2012) melakukan pengkajian hukum di bawah badan pembinaan hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2012. Penelitian yang dilakukan merupakan kajian hukum mengenai sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2012. Penelitian ini menggunakan kajian

normatif dan studi dokumenter. Kajian normatif menggunakan data sekunder berupa ketentuan - ketentuan hukum nasional dan bahan - bahan bacaan terkait. Selain itu, penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan *forum group discussion* yang digunakan sebagai data primer. Penelitian ini menggunakan dasar konsep *restorative justice*, yaitu, suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Penelitian ini memiliki hasil, sistem pembinaan narapidana dalam LAPAS dalam konsep *restorative justice* masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penegak hukum yang kurang akrab dengan konsep pembinaan ini. Hasil lainnya adalah UU No 12 Tahun 1995 belum benar - benar mendukung pembinaan sesuai dengan konsep dan prinsip *restorative justice*. Bagian dari penelitian ini yang digunakan adalah kajian normative dengan melihat Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahan – bahan tersebut akan digunakan sebagai data sekunder.

Aprilianda, Nurini (2012) melakukan pengkajian hukum mengenai model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di bawah pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional milik Kemenkumham RI pada 2014. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan perbandingan hukum, dengan metode analisis interpretasi. Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu, Teori absolut, yang membahas bahwa pidana adalah pembalasan bagi pelaku

kejahatan. Teori relatif, yang membahas mengenai pidana memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Dan teori pembinaan, di mana teori ini mengarah pada perbaikan narapidana, bukan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga pelaku tidak mengulangi lagi dan dapat diterima di masyarakat. Penelitian ini memiliki hasil, bahwa pembinaan anak yang telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, konsep alternatif model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak memerlukan kerja sama dengan berbagai instansi. Penelitian mengenai komunikasi dalam proses pembinaan dalam LAPAS belum pernah dilakukan. Penelitian ini akan mengambil unsur yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu pembinaan dalam LAPAS. Namun penelitian kali ini fokus pada komunikasi yang dilakukan oleh Petugas Pembina dan Warga Binaan selama proses pembinaan berlangsung. Dilihat dari 3 teori diatas, Teori rehabilitasi akan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian in.

Sulaiman, Adhi Iman (2013) melakukan penelitian mengenai model komunikasi formal dan informal dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dan diterbitkan oleh Jurnal Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman Vol 16 No 02 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi model ketiga mengenai interaksi kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pendekatan interaksi dengan model interaksional yang menekankan proses komunikasi terjadi dua arah di antara partisipan dan terdapat *feedback*. Penelitian ini menekankan pada komunikasi formal dan informal pada proses pemberdayaan.

Penelitian ini memiliki hasil, bahwa dalam proses pemberdayaan komunikasi formal dan informal sama – sama digunakan dan penting untuk memahami fungsi komunikasi selama proses itu berlangsung. Menggunakan teori pendekatan interaksi dengan model interkasiona dan model komunikasi ketiga, yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai teori untuk menjelaskan interaksi dalam proses pembinaan.

Penelitian mengenai pembinaan dalam Lembaga Masyarakat telah dilakukan sebelumnya. Susetyo, Heru (2012) meneliti mengenai implementasi hukum selama pembinaan dalam Lembaga Masyarakat. Aprilianda (2012) meneliti tentang model pembinaan anak dalam Lembaga Masyarakat Anak. Penelitian terakhir milik Sulaiman, Adhi Imam (2013) yang meneliti tentang model komunikasi pada pembinaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian saya memiliki kesamaan dengan penelitian Aprilianda yaitu mengenai pembinaan di LAPAS dan penelitian Sulaiman mengenai model komunikasi dalam proses pembinaan.

Susetyo menggunakan teori restorasi justice dengan metode penelitian studi documenter. Aprilianda menggunakan teori pembinaan dengan metode wawancara dan Forum Grup Discussion. Dan Sulaiman menggunakan model komunikasi interasional dengan teori *Interactional View* dan metode penelitian studi kasus. Ketiga penelitian tersebut merupakan penelitian dengan pokok masalah yang sama, persoalan pembinaan baik dalam instansi maupun masyarakat. Penelitian saya, memiliki topik masalah yang sama mengenai proses

pembinaan. Pada penelitian ini, saya menggunakan teori yang sama dengan penelitian Apriandi yaitu teori pembinaan untuk melihat konteks komunikasi dan menggunakan teori yang digunakan Sulaiman, yaitu Teori *Interactional View* untuk melihat Komunikasi dalam LAPAS. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian yang sama dengan Sulaiman, yaitu studi kasus.

1.5.3. *Interactional View*

Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara partisipan – partisipan dan menimbulkan efek. Salah satu model komunikasi dikembangkan oleh Schramm untuk menjelaskan bahwa Komunikasi kemudian berubah ke model yang lebih kompleks lagi, di mana kali ini tidak ada lagi *sender* ataupun *receiver*, namun partisipan – partisipan, dan setiap yang terlibat dalam komunikasi dapat berperan untuk memberikan pesan ataupun menerima pesan. Partisipan – partisipan itu berada pada posisi setara dan mereka dapat saling menukarkan pesan – pesan (West, 2010 : 12 – 13). Pada penelitian ini, model komunikasi milik Schramm digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi seharusnya dilakukan dalam LAPAS. Di mana dalam proses pembinaan, komunikasi tidak berjalan hanya satu arah dari Petugas Pembina kepada Warga Binaan, namun juga terdapat feedback dari Warga Binaan.

Komunikasi dalam institusi tidak selalu terjadi dalam konteks kelompok, namun juga dapat terjadi dalam konsteks antar individu. Komunikasi antar individu dalam institusi dapat terjadi apabila tiap individu mau untuk melepas atribut insitutsi dalam proses komunikasi (Schement, 2002 : 477). LAPAS

merupakan suatu lembaga, di mana baik Petugas Pembina maupun Warga Binaan terikat dalam status mereka. Namun, mereka juga dapat melakukan komunikasi antarindividu. Komunikasi antarindividu di sini dilihat ketika mereka berkomunikasi namun tidak membawa label terikat mereka dan topik yang dibicarakan masuk pada ranah personal.

Memahami komunikasi dalam LAPAS sebagai komunikasi antar individu antara Petugas Pembina dan Warga Binaan dapat menggunakan teori *Interactional View* atau pendekatan interaksi. Teori *Interactional View* diprakarsai oleh Paul Watzlawick. Teori ini menekankan pada hubungan yang berlangsung yang dibentuk dari pertukaran kata - kata pada interaksi yang spesifik (Littlejohn, 2009a : 900). Seperti dalam keluarga, di mana perilaku setiap orang berpengaruh dan dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Hubungan juga bukan merupakan suatu istilah yang sederhana. Hubungan yang terjalin juga dipengaruhi berbagai macam perilaku, emosi, dan bahkan kondisi fisik (Griffin, 2012 : 182). Hubungan dalam LAPAS terbentuk sejak pertama kali Warga Binaan masuk kedalam LAPAS. Interaksi dalam LAPAS pun dipengaruhi dari komunikasi yang terjadi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan. Penelitian ini akan melihat bagaimana perilaku dan komunikasi individu terbentuk karena interaksi yang terjadi. Sesuai dengan teori *Interactional View*, di mana hubungan terbentuk melalui pertukaran informasi dan interaksi yang terjadi antar partisipan. Menggunakan aksioma teori ini, yang akan melihat bagaimana interaksi dan komunikasi dalam LAPAS.

Interactional View memiliki beberapa aksioma untuk menjelaskan komunikasi yang terjadi dalam hubungan. Empat aksioma ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat interaksi dan komunikasi yang terjadi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan.

1. One Cannot Not Communicate,

Komunikasi terjadi pada siapapun, kapanpun, dan pada situasi apapun. Ada kondisi di mana seseorang harus berkomunikasi dan harus memberikan respon, dalam hal ini seseorang tidak dapat menghindari komunikasi. Walaupun tidak terjadi percakapan, ataupun kebisuan, komunikasi tetap terjadi, baik itu kebisuan, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Hal - hal nonverbal tersebut tentu saja memiliki pengaruh terhadap orang lain. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat tidak mempengaruhi orang lain. (Griffin, 2012 : 183 - 184). Maka dari itu, mustahil seseorang tidak berkomunikasi. Bahkan suatu kebisuan merupakan salah satu bentuk komunikasi (Littlejohn, 2009a : 900). Selama menghuni di LAPAS, komunikasi Warga Binaan dengan dunia luar sangat terbatas. Menurut aksioma ini, setiap individu tidak bisa tidak berkomunikasi. Apabila aksioma ini diterapkan dalam LAPAS, maka komunikasi yang terjadi terbatas pada sesama Warga Binaan, keluarga menjenguk, dan Petugas Pembina. Aksioma ini akan digunakan untuk melihat komunikasi, baik formal maupun informal, baik verbal maupun verbal yang dilakukan di dalam LAPAS.

2. Communication = Content + Relationship

Setiap komunikasi memiliki aspek konten dan hubungan. Watzlawick mendeskripsikan konten sebagai apa yang diungkapkan secara verbal dan hubungan sebagai mana itu disampaikan secara nonverbal. Sebagai tambahan, hubungan di sini juga bisa dilihat sebagai metakomunikasi. Pesan - pesan metakomunikasi selalu menjadi elemen terpenting dalam komunikasi (Griffin, 2012 : 184). Metakomunikasi biasanya didefinisikan sebagai komunikasi tentang komunikasi. Orang - orang biasanya menerima dua jenis informasi pada setiap pesan, konten dan pesan metakomunikasi mengenai pesan pertama untuk dipahami. Metakomunikasi dapat berupa eksplisit maupun implisit. Biasanya, metakomunikasi tidak disampaikan dalam kata - kata namun berisi informasi mengenai arti (Littlejohn, 2009a : 900). Menurut aksioma ini, dalam komunikasi, baik konten maupun hubungan memiliki peran penting. Aksioma ini akan digunakan untuk melihat konten apa yang di komunikasikan oleh Petugas Pembina dan Warga Binaan selama mereka berkomunikasi. Selain itu, metakomunikasi memiliki peran penting, sesuai dengan aksioma ini, maka metakomunikasi juga akan diteliti dalam penelitian ini.

3. The Nature of a Relationship Depends on How Both Parties Punctuate the Communication Sequence.

Punctuate disini adalah menginterpretasi sebuah rangkaian kejadian yang sedang berlangsung dengan memberi label pada satu kejadian sebagai penyebab dan kejadian lain sebagai akibat. Watzlawick menyarankan bahwa masalah dari *punctuation* ini adalah individu bahwa dirinya sebagai seseorang yang bereaksi

tidak sebagai penyebab. Untuk beberapa hubungan tertentu bagaimana urutan komunikasi ini saling berpengaruh, namun setiap individu selalu memberikan label mengenai komunikasi yang dilakukan orang lain kepada dirinya. (Griffin, 2012 : 185). Setiap komunikasi juga menghasilkan respon. *Interactionan view* menekankan bahwa biasanya mereka beradaptasi pada bahasa dan perilaku satu sama lain untuk memberikan respon mereka, baik itu respon simetris maupun komplementer (Littlejohn, 2009 : 900). Tujuan utama dalam LAPAS adalah memperbaiki individu untuk menjadi warga negara yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai pembinaan dilakukan kepada Warga Binaan. Aksioma ini menjelaskan bahwa ada komunikasi dan kejadian – kejadian khusus yang akan membawa kepada suatu akibat, serta bagaimana persepsi partisipan dalam melihat komunikasi tersebut sebagai suatu bentuk intraksi. Aksioma ini digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi terjadi dan bagaimana Warga Binaan dan Petugas Pembina menginterpretasi pesan – pesan yang diberikan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan.

4. All Communication is Either Symmetrical or Complementary

Aksioma ini cenderung berfokus pada metakomunikasi. Di atas disebutkan mengenai hubungan yang termasuk adalah isu kepemilikan, afeksi, kepercayaan, dan intimasi, teori ini kemudian memberikan perhatian pada kontrol, status, dan *power*. Menurut Watzlawick (dalam Griffin, 2012 : 186), komunikasi simetris berdasarkan dari kesamaan kekuasaan, sedangkan komunikasi yang cenderung komplementari berasal dari perbedaan kekuasaan. Dari keduanya, tidak ada yang

baik maupun buruk, karena komunikasi memiliki dua tipe ini. Pada komunikasi simetris, apabila terlalu banyak kesamaan dapat berubah menjadi kompetisi. Dan komunikasi komplementari dapat menjadi destruktif karena besarnya kekuasaan satu partisipan dibanding partisipan lainnya.

Interactional View memandang bahwa tidak bisa memberikan label kepada hubungan hanya berdasarkan satu keputusan verbal. Entah itu simetris maupun komplementer, itu membutuhkan lebih dari dua pesan yang ditukarkan. Ada 3 kemungkinan komunikasi dan percakapan yang dapat terjadi, dan ketiga komunikasi ini dapat digunakan sebagai pemberi pesan maupaun pemberi respon, *One-up communication*, sebuah komunikasi untuk mendapatkan kontrol dan berusaha menjadi dominan. *One-down communication*, percakapan yang terjadi untuk menerima hasil yang dipertukarkan, menjadi pihak yang menerima. Dan *One-across communication*, pergerakan yang berusaha menetralkan atau mengontrol saat terjadi pertukaran, namun jika hanya satu partisipan yang menggunakan disebut oleh *transitory* (Griffin, 2012 : 186-187). *Labelling* adalah hal yang biasa diberikan ketika komunikasi terjadi dalam lembaga. Ada pihak yang memiliki label superior dan pihak yang memiliki label inferior. Label superior biasanya diberikan kepada Petugas Pembina dan label inferior biasanya disematkan pada Warga Binaan. Aksioma ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat komunikasi secara simetris maupun komplementer, walaupun ada label dan perbedaan kekuasaan dalam LAPAS.

Teori *Interactional View* digunakan dalam penelitian ini karena melihat bahwa komunikasi yang terjadi antar individu dipengaruhi oleh orang lain. Teori ini akan digunakan untuk melihat peran partisipan dalam interaksi yang terjadi selama proses pembinaan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang.

1.5.4. Pembinaan dalam Lembaga Masyarakat

Lembaga Masyarakat erat kaitannya dengan penghukuman pidana. Hukuman pidana diberikan kepada pelaku kejahatan tertentu. Setelah seseorang dijadikan tersangka, apakah hukuman telah dijatuhkan maupun tengah menjalani persidangan, semua penghukuman pidana terdapat dalam LAPAS.

Ada 3 teori yang dijadikan acuan dalam proses hukum pidana (Bemmel, 1987 : 28), Teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Di Indonesia , teori landasan dalam hukum pidana adalah teori gabungan, teori gabungan juga disebut Teori Pembinaan / *Reformation / Rehabilitation theory* (Kansil, 2007 : 289). Indonesia menganut teori gabungan dalam proses penghukuman pelaku tindak kejahatan. Hukuman dijatuhkan berdasarkan asas keadilan dan digunakan untuk mempertahankan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Teori ini merupakan teori yang digunakan untuk memahami fungsi dari pembinaan dalam Lembaga Masyarakat. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku agar ia meninggalkan kebiasaan buruk dan agar ia lebih cenderung mematuhi norma yang berlaku. Teori ini berpusat pada perbaikan narapidana, tidak kejahatan yang ia lakukan. Karena fungsi utamanya adalah mencegah pelaku kembali melakukan perbuatannya. Menurut Packer (dalam Apriandi, 2014:29)

hukuman terbaik adalah meyakinkan bahwa itu dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan merubah karakter dari penjahat agar ia sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan kata lain, memperbaiki dia. Cavadino dan Dignan menyatakan (dalam Aprilianda, 2014:29), rehabilitasi adalah suatu ide penghukuman yang dapat menurunkan tingkat kejahatan dengan memperbaiki karakter atau perilaku dari penjahat hingga ia tidak lagi melakukan kejahatan kembali. Menurut teori rehabilitasi, keberhasilan perbaikan perilaku terpidana, masing - masing Warga Binaan memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya. Pokok pembahasan dalam rehabilitasi adalah memperlakukan Warga Binaan sebagai individu dengan kebutuhan khusus dan permasalahan tertentu yang harus dipahami sehingga memungkinkan untuk keefektifan hubungan dengan nya. Beratnya kejahatan yang dilakukan tiap individu digunakan sebagai hitungan untuk petunjuk seberapa intensif dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi.

Tujuan dari teori rehabilitasi meliputi, sebagai bentuk penghakiman, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, maka dari itu, tiap kejahatan memiliki masa hukuman berbeda. Selain itu, Teori ini juga memiliki maksud bahwa hukuman dilakukan untuk memperbaiki si penjahat, serta menjaga dan memelihara tata tertib masyarakat (Kansil, 2007 : 287-289). Menurut Rossi (Dalam Bemmelen, 1987 : 28-30) penghukuman mutlak sebagai dasar utama telah melakukan kejahatan tidak akan bisa mencapai keadilan mutlak, maka dari itu, penghukuman sesuai dengan kejahatan dan pada sarana nya. Maka dari itu, pemberian hukuman

harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat. Teori ini memberikan usulan mengenai memperbaiki penjahat, sebagai bentuk memberikan kepuasan moral kepada kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman. Selain itu, tujuan utama teori ini juga berpengaruh terhadap pihak yang melakukan kejahatan, yaitu agar mereka jera, dan pribadi mereka menjadi lebih baik (Marpaung, 2008 : 167).

Di Indonesia, berdasarakan RUU KUHP tahun 2008 pasal 54, pidanaanan bertujuan untuk mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakatPembinaan dalam Lembaga Pemasayarakatan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatatan, dalam pasal 1 pada Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa pembinaan di sini yang dimaksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatatan. Sistem pembinaan pemasyarakatatan, sesuai pasal 5 UU No 12 Tahun 1995, di landaskan oleh asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu - satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga. Pembinaan meliputi

kegiatan pembinaan pembimbing kepribadian kemandirian. Yaitu terdiri dari : Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja; dan latihan kerja dan produksi.

. Berdasarkan hal tersebut, teori pembinaan dipilih sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori pembinaan digunakan untuk memahami proses pembinaan dan perlakuan pembinaan yang dilakukan Petugas Pembina pada saat Warga Binaan melakukan masa hukuman mereka dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang. Teori pembinaan ini akan digunakan sebagai bahan acuan selain dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri untuk melihat pembinaan kepada Warga Binaan dalam LAPAS Wanita Kelas IIA Semarang. Teori pembinaan, perundangan, dan peraturan – peraturan lain akan digunakan untuk melengkapi teori *Interactional View* untuk melihat hubungan komunikasi keduanya dalam hukum, serta pesan dan konten yang mungkin dipertukarkan selama mereka melakukan interaksi di LAPAS.

Penelitian kali ini menggunakan kerangka berfikir konstruktivisme untuk melihat realita yang terjadi di dalam LAPAS. Pembinaan sendiri merupakan unsur penting dalam masyarakat. Pembinaan di LAPAS sesuai dengan Teori Pembinaan oleh Rossi, teori ini akan digunakan dalam melihat pembinaan sebagai suatu konteks komunikasi yang terjadi di LAPAS. Teori tersebut digunakan untuk melengkapi teori *Interactional View* dalam melihat konteks yang dikomunikasikan dalam LAPAS.

Sedangkan teori *Interactional View* itu sendiri digunakan untuk melihat proses interaksi dan komunikasi yang terjadi antar Warga Binaan dan Petugas Pembina dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di mana pelaku kejahatan menghabiskan masa hukumannya. Selama menjalani masa hukuman, komunikasi yang dilakukan Warga Binaan terbatas hanya pada sesama Warga Binaan, keluarga yang berhak menjenguk, dan Petugas Pembina. Penelitian ini akan melihat komunikasi dan unsur komunikasi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang.

1.6.1 Komunikasi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan

Komunikasi yang dimaksud merupakan pertukaran pesan – pesan yang terjadi selama proses pembinaan Warga Binaan. Bahwasanya, pesan – pesan yang ditukarkan dipengaruhi dengan hubungan mereka. Serta, bagaimana partisipan berlaku sesuai dengan interpretasi dia terhadap pesan yang ditukarkan oleh partisipan lain. Komunikasi disini akan dilihat melalui pendekatan interaksi, di antaranya adalah intensitas interaksi, konten dan bahasa, penggunaan panggilan dan kedalaman hubungan, dan *feedback*.

1.6.1.1 Intensitas Interaksi

Intensitas interaksi yang dimaksudkan adalah seberapa sering Petugas Pembina dan Warga Binaan melakukan interaksi dan

komunikasi. Selain itu, intensitas juga dimaksudkan untuk mencari tahu, seberapa lama komunikasi itu berlangsung.

1.6.1.2 Konten dan Bahasa

Konten yang dimaksud oleh Watzlawick adalah konten apa yang dikomunikasikan antar partisipan. Konten adalah pertukaran pesan secara verbal, termasuk menentukan topik apa yang dibahas, pesan apa yang dikomunikasikan, dan bagaimana pesan dalam topik itu disampaikan. Bahasa di sini sebagai salah satu aspek untuk diteliti, bahasa, selain secara literal, juga termasuk penggunaannya secara formal maupun informal.

1.6.1.3 Kedalaman Hubungan

Penggunaan panggilan adalah bagaimana partisipan memanggil dan memberikan panggilan – panggilan tertentu pada partisipan lain. Panggilan di sini juga dimaksudkan bagaimana partisipan ingin dipanggil dan bagaimana partisipan sebenarnya dipanggil. Sedangkan kedalaman hubungan adalah seberapa dalam dan seberapa paham mereka dengan partisipan lain. Kedalaman akan dilihat dari pemahaman partisipan, dari sektor formal hingga bagian privat dari partisipan lain.

1.6.1.4 Kepemilikan Kekuasaan *Feedback*

Kepemilikan kekuasaan adalah bagaimana tingkatan kekuasaan yang digunakan selama proses pembinaan di LAPAS. Kepemilikan kekuasaan juga akan dilihat bagaimana arah komunikasi yang terjadi.

Feedback yang dimaksud adalah tindakan atau komunikasi balas yang dilakukan partisipan akan pertukaran pesan dengan partisipan lain. *Feedback* juga dilihat dari mulai pengambilan keputusan untuk memberikan balasan atas suatu pesan yang disampaikan hingga *feedback* itu dilakukan.

1.7 Metoda Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam menjelaskan komunikasi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan adalah tipe penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, metode tersebut akan menjelaskan komunikasi yang terjadi dalam proses pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Denzin dan Lincoln (Dalam Salim, 2001 : 5-6) Penelitian Kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan pendekatan interpretatif dan wajar pada setiap pokok permasalahan. Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, untuk memahami, dan memberi arti pada fenomena. Penelitian ini melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris. Dengan demikian, penelitian kualitatif mengembangkan beragam metode dengan harapan dapat memahami pokok permasalahan.

Metode Studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Kecenderungan utama di antara semua

ragam studi kasus adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan dan bagaimana diterapkan, dan hasilnya. Studi kasus digunakan ketika kejadian terjadi dalam dunia nyata, dan batas antara fenomena dan konteks tidak begitu terlihat dan menggunakan berbagai macam bukti. Dalam studi kasus dapat terjadi kasus tunggal dan kasus jamak, dan keduanya dapat menggunakan *single level analysis* maupun *multi level analysis*. (Salim, 2001 : 92 - 95)

Studi kasus memiliki ciri, yaitu unik, kontemporer dan peneliti tidak bisa mengintervensi. Keunikan dari penelitian ini adalah, *setting* di mana komunikasi ini terjadi adalah pada Lembaga Pemasarakatan, di mana tentu saja komunikasi yang terjadi disini berbeda dengan komunikasi yang terjadi di tempat lain. Kontemporer, karena komunikasi ini terjadi pada saat ini, dan pada waktu yang sama. Serta, peneliti sama sekali tidak terlibat dalam komunikasi yang terjadi dalam Lembaga Pemasarakatan.

Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan *single level analysis*, di mana yang dilihat adalah perilaku individu atau kelompok dengan satu masalah penting. Dalam hal ini, yang dilihat adalah perilaku komunikasi Petugas Pembina dan Warga Binaan, serta masalah pentingnya adalah proses pembinaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan model pengkajian deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti. (Salim, 2001 : 95-96)

Dalam penelitian ini akan dipaparkan data yang disajikan merupakan uraian yang memaparkan, menggambarkan. Menguraikan, dan menjelaskan

tentang komunikasi yang terjadi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan selama proses pembinaan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang.

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Petugas Pembina LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang, Warga Binaan (Tahanan dan Narapidana) LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang. Untuk melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan antara Petugas Pembina dan Warga Binaan selama proses pembinaan berlangsung di LAPAS Perempuan Kelas

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara dengan subjek penelitian, hasil observasi pada tempat penelitian, dan dokumen – dokumen terkait.

1.7.5. Sumber Data

1. Data primer : Data primer yang digunakan didapatkan dari wawancara langsung dengan Petugas Pembina dan Warga Binaan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang

2. Data Sekunder : Data pendukung yang digunakan didapatkan dari observasi lapangan dan sumber - sumber tambahan seperti buku, Peraturan, artikel, jurnal, dan bahan yang di dapat dari Internet.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dilakukan kepada Petugas Pembina dan Warga Binaan sebagai 1 unit. Data yang diperoleh melalui wawancara akan dijadikan acuan sebagai data primer. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik obeservasi, teknik obeservasi ini untuk mengamati keadaan dari sudut pandang orang ketiga untuk memahami kondisi dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA selama proses pembinaan. Data yang dihasilkan dalam observasi akan digunakan sebagai data sekunder. Baik data primer dan data sekunder, keduanya akan digunakan dalam analisis data.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dilakukan sesuai dengan konsep *Interactional View*. Analisis ini dimulai dengan merekam interaksi yang terjadi antar partisipan dan membuat transkrip dari pembicaraan yang terjadi. Melalui metode studi kasus, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah pembuatan eksplanasi. Analisis pembuatan eksplanasi adalah menganalisis data dengan membuat suatu eksplanasi tentang kasus (Yin, 2014:146). Pembuatan eksplanasi mengenai penetapan serangkaian timbal balik atas suatu kejadian. Eksplanasi sering dilakukan dalam bentuk naratif. Sebaiknya, eksplanasi yang dilakukan dapat mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan secara teoritis (Yin, 2014:147).

Pembuatan eksplanasi juga dilakukan pada data – data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Pembuatan eksplanasi dilakukan setelah

analisis data dilakukan. Miles dan Huberman (1994 : 10 - 12) mendefinisikan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mentransformasi data yang ada pada tulisan maupun transkrip. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, di mana itu merupakan bentuk analisis yang menjelaskan, memfokuskan, dan menata data hingga kesimpulan dapat dibuat.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan informasi yang sudah ditata, dan disederhanakan. Penyajian data bisa bermacam - macam, dan semuanya dibuat agar data dapat mudah diolah. Penyajian data merupakan proses analisis data dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Kegiatan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari data yang telah di reduksi dan disajikan. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut agar hasil penelitian adalah pasti.

Teknik analisis data pembuatan eksplanasi memiliki tahap. Setelah data di analisis, data tersebut dimasukkan dalam analisis pembuatan eksplanasi. Hakikat utama dalam analisis ini adalah perulangan dalam pembuatan eksplanasi.

Karakteristik bahwa eksplanasi akhir tersebut merupakan hasil serangkaian perulangan. Dalam Yin (2014:147-148), serangkaian perulangan tersebut adalah:

- Membuat pernyataan teoritis awal
- Membandingkan temuan awal dengan pernyataan awal tadi
- Memperbaiki pernyataan
- Membandingkan rincian kasus lain dalam rangka perbaikan tersebut.
- Memperbaiki lagi pernyataan
- Membandingkan dengan temuan berikutnya
- Mengulangi kembali proses ini sebanyak yang diperlukan.

Data dalam penelitian ini harus diuji, proposisi diperbaiki, dan kemudian data tersebut diuji kembali dengan pernyataan baru. Setelah data dianalisis dengan reduksi dan disajikan, data di proses dengan serangkaian pembuatan eksplanasi untuk menghasilkan sebuah penjelasan mengenai kasus. Data dalam penelitian ini, berupa transkrip wawancara dan catatan observasi lah yang akan digunakan sebagai data untuk membandingkan dengan pernyataan teoritis di awal.

1.7.8. Kualitas Penelitian

Menggunakan penelitian konstruktivisme, kualitas penelitian diperoleh melalui kredibilitas dan otentitas dari realita yang dilakui oleh pelaku sosial. Kredibilitas pada penelitian ini berupa subjek pada penelitian ini merupakan narasumber yang kredibel dan memahami tema penelitian ini. Unsur otentik pada penelitian ini bahwa data – data yang di dapatkan dari narasumber merupakan data

otentik. Studi kasus memiliki kualitas penelitiannya sendiri, dalam penelitian kali ini, kualitas penelitian diperoleh melalui validitas konstruk (Yin, 2014 : 193), yaitu digunakannya berbagai sumber data. Pada penelitian ini, berbagai sumber data akan digunakan, yaitu dokumentasi, transkrip wawancara, dan catatan observasi.

1.8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, bahwa komunikasi yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan terbatas hanya pada lingkup Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dan belum tentu dapat diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan lain.